

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Utama, Jakarta.
- Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M.,2013, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dr. Irawan Soerodjo, SH.,M.Si., Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2014).
- E.Utrechth, 1988, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Gunawan Widjaja, 2008, Resiko Hukum Pemilik, Direktur & Komisaris PT, Cet. 1, Forum Sahabat, Jakarta.
- H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1995, Hoofdstukken van AdministratiefRecht, Uitgeveriz Lemma BV., Utrecht.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Lukman Santoso AZ, 2016, Hukum Perikatan, Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis, Setara Press, Malang.
- Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H.,M.H., 2014 Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Surya, 2006, Penerapan Good Corporate governance, Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan usaha, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim H.S.,S.H.,H.S., 2008, Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontra, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal Nasional / Surat Kabar / Majalah :**

Nanang Yusroni & Dumadi Tri Restiyanto, 'Privatisasi Badan usaha Milik Negara (BUMN), Eksistensi, Dan Kinerja Ekonomi Nasional Dalam sistem Ekonomi Pasar', AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 74 2 No. 3, April 2007.

Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., 'Peran Pemerintah Dalam Pengaturan Industri Pelabuhan Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 33 No.6, tahun 2014.

Nandang Sutrisno, 'Meningkatkan Peran Strategis Pelabuhan Dalam Kerangka Perdagangan Bebas : Reformasi Undang-undang Pelayaran', Jurnal Hukum Bisnis Vol. 33 No.6, tahun 2014

### **Website Internet :**

<https://nusantaranews.wordpress.com/2009/07/12/sejarah-bumn-imf-word-bank-dan-privatisasi-di-indonesia-3/>, Sejarah BUMN, IMF-World Bank dan Privatisasi di Indonesia (3), 12 Juli 2009.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/konsep-dasar-dan-hakikat-penelitian/> , Konsep Dasar & Hakikat Penelitian, 21 Mei 2013.

<http://equityjusticia.blogspot.co.id/2013/09/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum.html>, Badan Hukum sebagai Subjek Hukum, Arief Ainul Yaqin, 16 September 2013.

<http://www.beritasatu.com/ekonomi/326793-perjanjian-konsesi-2015-tak-bisa-jadi-alasan-benarkan-kontrak-jict-2014.html> , Markus Junianto Sihaloho / WBP, diposting pada hari Rabu, 2 Desember 2015 | 20:37 WIB

<http://ayudiahs.blogspot.co.id/2016/02/metode-penelitian-hukum.html> , Metode Penelitian Hukum, 24 Februari 2016.

<https://news.okezone.com/read/2016/06/23/337/1423736/menhub-perjanjian-jict-dan-koja-batal-demi-hukum>, Fahmi Firdaus , Jurnalis • diposting pada hari Kamis, 23 Juni 2016 - 22:54 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/politik/20170717103634-32-228296/pansus-pelindo-ii-serahkan-audit-investigatif-bpk-ke-kpk/>, Fery Agus Setyawan, Senin, 17/07/2017 15:01 WIB

**Dokumen :**

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jakarta International Container Terminal No. 72 tanggal 27 Maret 1999.

Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian Dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, 27 Maret 1999, antara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT. Jakarta International Container Terminal.

Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan Dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemask, 27 Maret 1999, antara PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT. Jakarta International Container Terminal.

Laporan Tim Evaluasi Konsesi Serikat Pekerja JICT Tanggal 10 Oktober 2014.

Perjanjian Konsesi Antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) tentang Kegiatan Pengusahaan Di Pelabuhan Yang Diusahakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. HK.107/7/OP.TPK-15 dan HK.566/11/11/1/PI.II-15.

Laporan Panitia Angket DPR RI Tentang Pelindo II Kepada Sidang Paripurna DPR RI, Kamis, 17 Desember 2015.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Atas Perpanjangan Kerjasama Pengoperasian Dan Pengelolaan Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Berupa Kerjasama Usaha Dengan PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) Pada PT. Pelabuhan Indonesia II, PT. JICT Dan Instansi Terkait Lainnya No. 10/LHP/XXV-AUI/06/2017 tanggal 6 Juni 2017.

**Wawancara :**

Wawancara dengan M. Firmansyah Sukardiman, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja JICT, tanggal 14 Agustus 2017

Wawancara dengan Yuniadi Noorriza, S.H., M.H., Ketua Tim Evaluasi Konsesi Serikat Pekerja JICT, tanggal 16 Agustus 2017

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad No.23 Tahun 1847.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU No.5 Tahun 1960 LN. No. 104 Tahun 1960, TLN.No. 2043.

Undang-undang tentang Pelayaran, UU No. 21 Tahun 1992 LN. No.98 Tahun 1992, TLN No. 3493

Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No.4297

Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal LN.No.67 Tahun 2007, TLN.No.4724.

Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, L.N No. 106 Tahun 2007, T.L.N No. 4756.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, L.N No. 64 Tahun 2008, T.L.N No. 4849.

Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan, PP No. 61/2009 LN No. 151 Tahun 2009, TLN No. 5070.

Peraturan Menteri Negara BUMN no. : PER — 01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.